

# **M E M O R I A   P A S S I O N I S**

---

**DAMPAK KEHADIRAN APARAT KEAMANAN  
BAGI SITUASI KEMASYARAKATAN DAN HAM**

**DI**

**WILAYAH PEGUNUNGAN BINTANG  
TAHUN 1998 – AWAL 1999**

**LAPORAN**

**OLEH**

**SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN  
KEUSKUPAN JAYAPURA  
IRIAN JAYA**

**JAYAPURA  
JULI 1999**

KATA PENGANTAR

---

**KEUSKUPAN JAYAPURA  
KOTAK POS 1379  
JAYAPURA 99013, INDONESIA**

TEL : +62-967-533092  
FAX : +62-967-536427

---

Jayapura, 1 Juli 1999

**Kepada Yth.**  
Bapak Gubernur KDH Tk. I  
Bapak Ketua DPRD Tk. I  
Bapak Panglima Kodam VIII Trikora  
Bapak Kapolda Tk. I  
di  
**JAYAPURA**

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan satu berkas **LAPORAN: DAMPAK KEHADIRAN APARAT KEAMANAN BAGI SITUASI KEMASYARAKATAN DAN HAM DI WILAYAH PEGUNUNGAN BINTANG**. Mohon Bapak-Bapak berkenan menerimanya.

Sebagaimana diketahui bersama selama satu tahun terakhir ini masyarakat Papua makin hari makin mengungkapkan isi hatinya, sampai menyampaikan aspirasinya dengan terbuka kepada Bapak Presiden pada tanggal 26 Februari 1999 yang lalu.

Kenyataan seperti dimaksudkan diatas sering menimbulkan pertanyaan: "Kenapa masyarakat Papua sampai menuntut pengakuan atas kemerdekaannya?" Pertanyaan demikian memang tidak dapat dihindari dan jawaban atasnya dapat kita dengar melalui segala macam tanggapan serta keterangan sepotong-sepotong yang selama satu tahun terakhir ini disajikan kepada kita semua. Ternyata dalam lubuk hati masyarakat Papua tersimpan banyak pengalaman yang tidak pernah dibuka dengan begitu jelas, sambil mengungkapkan pula segala kekecewaan atas kenyataan bahwa isi hatinya tidak pernah mau didengar betul oleh pihak yang berkuasa.

Kami sangat sadar bahwa segala simpanan hati masyarakat Papua tadi merupakan suatu sumber 'protes yang dinamis' yang tidak kehabisan selama tidak ditanggapi secara terbuka. Kami mengharapkan bahwa melalui laporan yang kami sajikan bersama ini kami dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman kita bersama atas apa yang sebenarnya menjadi akar ketidakpuasan masyarakat yang ingin kita layani.

Laporan ini memberikan perhatian pada sejumlah kejadian di wilayah Pegunungan Bintang. Melalui sejumlah fakta diberikan suatu gambaran mengenai “suasana kemasyarakatan” yang menjadi hasil dari tindakan-tindakan yang kurang dapat kami puji. Perlu kita berani tanyakan: apakah memang masyarakat yang mengalami suasana ini betul salah kalau mengangkat suaranya dan minta untuk diberikan peluang untuk “mengatur rumah tangganya sendiri”?

Harapan kami supaya bahan yang disajikan dalam laporan ini turut membantu mengajak Bapak-Bapak untuk merenungkan baik-baik mengenai peranan mana Bapak-Bapak mau tunjukkan ditengah-tengah masyarakat Papua yang ingin Bapak-Bapak layani? Semoga.

Hormat kami,

Mgr. Dr. Leo Laba Ladjar OFM  
Uskup Jayapura

Yang mendukung:

Pdt. Herman Saud  
Ketua Sinode GKI

Pdt. Benny Giyai  
Ketua Litbang GKII

Tembusan:

1. Tim Pastoral Pegunungan Bintang
2. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia
3. Komisi Nasional Hak-Hak Azasi Manusia
4. Jaringan Kerja SEKKP Keuskupan Jayapura

KEUSKUPAN JAYAPURA  
KOTAK POS 1379  
JAYAPURA 99013  
INDONESIA

SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN  
TEL: +62-967-534993  
FAX: +62-967-536427  
E-Mail:sekkp@jayapura.wasantara.net.id

## **DAMPAK KEHADIRAN APARAT KEAMANAN BAGI SITUASI KEMASYARAKATAN DAN HAM DI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 1998-AWAL 1999**

Wilayah Pegunungan Bintang adalah bagian dari wilayah Kabupaten Jayawijaya yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG). Wilayah ini dari sudut pandang ABRI digolongkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) atau daerah merah hingga status itu dicabut bulan Oktober 1998 yang lalu. Namun demikian, de facto, di wilayah ini masih ditempatkan pasukan-pasukan non-organik yang didatangkan dari luar wilayah Irian Jaya. Tahun 1998, di wilayah Pegunungan Bintang ditempatkan Pasukan Yonif 726 Tamalatea yang menempati pos-pos utamanya di Oksibil, Kiwirok, Abmisibil, Batom, dan Iwur<sup>1</sup>. Selain Pasukan itu hingga awal tahun 1999, ditempatkan juga Satuan Kopassus Tribuana di tiga pos: Oksibil, Batom, dan Kiwirok. Pada pertengahan bulan Februari 1999, terjadi pergantian pasukan non-organik. Pasukan Yonif 726 Tamalatea ditarik dan digantikan Pasukan Yonif 711 Raksatama. Adapun Satuan Kopassus Tribuana belum digantikan dengan kelompok yang lain.

Kehadiran pasukan non-organik dan aparat keamanan lainnya membawa sejumlah dampak yang cukup serius karena memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan data dan laporan dari Petugas-petugas Gereja Katolik yang melayani Wilayah Pastoral Pegunungan Bintang, berikut ini dilaporkan berbagai dampak serius akibat kehadiran militer di wilayah itu khususnya selama tahun 1998 hingga awal tahun 1999. Secara sistematis, laporan ini membeberkan sejumlah fakta yang terjadi, menganalisis pengaruh atau dampaknya bagi situasi HAM, dan mengajukan sejumlah rekomendasi.

---

<sup>1</sup> Lihat peta-peta yang terlampir

## I FAKTA-FAKTA

Dalam bagian pertama ini diuraikan berbagai fakta yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Oksibil, Kiwirok, dan Okbibab.

### A. KECAMATAN OKSIBIL

#### 1. Juli-Agustus 1998: Intimidasi oleh aparat keamanan terhadap masyarakat Oksibil dengan meniupkan isu kemerdekaan Irian dan isu pihak OPM siap menyerang Oksibil

##### **3 Juli 1998**

Suryansyah, salah seorang anggota Satuan Kopassus Tribuana di Oksibil datang ke rumah Toni Oktemka, guru SD YPPK Mabilabol, dan meminta pendapatnya mengenai demo-demo yang terjadi di Jayapura. Toni menjawab bahwa ia tidak tahu menahu mengenai hal itu; dan masalah itu adalah masalah orang kota. Pada kesempatan yang sama Toni juga diberitahukan bahwa ada rencana demo sejenis di wilayah Pegunungan Bintang. Setelah mendengar hal ini, Toni melaporkannya kepada Pastor Willem Sinawil pr.

##### **6 Juli 1998**

Pastor Willem mengumpulkan kepala Desa Bulangkop, Okto Uropmabin, dan Ketua Dewan Stasi Bulangkop, Amatus Kaladana, di Pastoran Oksibil. Isinya: mencek kebenaran isu-isu tersebut. Ternyata diperoleh informasi bahwa isu tersebut tidak benar karena samasekali tidak ada tanda-tanda ke arah demo.

##### **8 Juli 1998**

Tersebar isu lain di Oksibil, yakni bahwa ada sejumlah orang turun dari Marantikin. Mereka itu katanya pengungsi. Isu ini terbukti palsu karena para pengungsi itu melaporkan diri kepada Pastor Paroki bahwa mereka adalah masyarakat desa Marantikin yang menghantar mantri Viktor Uropkulin ke Oksibil dan mau melihat kuburan keluarga serta mencek beras Bama. Mereka ini terdiri dari Toni Bamulki beserta isterinya (Aloysia Uropkulin), Edi Uropkulin beserta isteri dan anaknya, Nongbomen Wayam, dan Marko Uropkulin.

##### **18-19 Juli 1998**

Pastor Barnabas Daryono pr bersama guru Ignas Tapyor pergi ke Desa Pepera untuk mencek kebenaran isu demo itu. Ternyata umat di Pepera tidak tahu apa-apa tentang isu tersebut dan tidak ada tanda-tanda ke arah demo. Para tokoh umat, ketua BMK, dan Kades Pepera mengatakan bahwa isu itu buatan orang-orang 'pintar' di kota Oksibil.

### **20 Juli 1998**

Para Kades Oksibil dipaksa oleh Serda Pol Samsudin, anggota Polsek Oksibil, untuk menandatangani surat pernyataan. Isinya: tidak mau mendirikan negara baru dan akan mengadakan perang terhadap mereka yang menaikkan bendera OPM. Surat itu mengatasnamakan Ketua Lembaga Adat Ngalum. Bernard Wayam, Kades Dabolding, telah dipaksa tanda tangan pada tgl. 17 Juli 1998 dan selanjutnya giliran Okto Kalakmabin. Kades lainnya menolak untuk tanda tangan setelah mendapat informasi dari Pastor bahwa Ketua Lembaga Adat Ngalum tidak pernah membuat pernyataan yang dimaksudkan.

### **21 Juli 1998**

Laporan via SSB datang dari Desa Oklip kepada Pastor Paroki di Oksibil. Diberitahukan bahwa kepala desa Okhim dipaksa oleh Anggota Yonif 726 Tamalatea Kiwirok untuk menandatangani surat pernyataan yang katanya sudah disetujui Ketua Lembaga Adat Ngalum di Oksibil. Senyatanya, Ketua Lembaga Adat Ngalum tidak pernah menandatangani surat pernyataan itu. Karenanya Pastor Paroki melarang surat itu ditandatangani oleh Kades Okhim.

### **25 Juli 1998, pk. 14.00 WIT**

Rumah Kades Dabolding, Bernard Wayam, didatangi oleh 3 orang anggota Satuan Yonif 726 Tamalatea di Oksibil. Tentara mau mencek apakah ada masyarakat yang pulang ke Dabolding dan lapor ke Kades. Menurut tentara ada 5 KK yang pulang. Tentara menanyakan, "Apakah bapak mau menerima mereka?" Kades menjawab, "Saya tidak tahu karena tidak pernah lihat muka mereka". Kades masih ditanya-tanya soal penyimpanan senjata api dan soal kaitan dengan OPM. Kades menjawab tidak tahu apa-apa soal itu.

### **4 Agustus 1998, pk. 19.00-21.00 WIT**

Diadakan rapat di pos Kopassus Tribuana di Oksibil. Di situ hadir Kapolsek Oksibil, Serka Pol. Petrus Amir, dan 6 tokoh masyarakat: Toni Oktemka, Niko Kakyarmabin, Yosep Sasaka, Yohanes Kakyarmabin, Yan Kasipmabin, dan Hieron Bamulki. Danpos Kopassus: Serda Syaiful mengatakan bahwa rapat itu dimaksudkan untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

- di Kampung Dewok sedang dijahit 9000 bendera OPM yang akan disebar ke sembilan kabupaten yang ada di Irian
- ada 1 orang Belanda yang datang ke sana dan membantu
- OPM sudah berkumpul di Kampung Dewok untuk mengadakan rapat yang dipimpin oleh Anis Weyap dan siap menyerang Oksibil dengan senjata berat Minimi, ditambah 10 pucuk NRC, 10 pucuk M-16, dan 10 pucuk SPN.
- 11 Agustus 1998: akan terjadi pengibaran bendera OPM di Marantikin sehingga saat itu kumpul tokoh-tokoh OPM dari berbagai penjuru seperti Matias Wenda, Daniel Kogoya, Paulus Kaladana, Karel Uropkulin, Anis Weyap. Daniel Kogoya datang dengan pesawat dari Wamena turun di Tanah Merah<sup>2</sup> lalu naik truk milik PT Conoco ke Marantikin.

---

<sup>2</sup> Tanah Merah terletak di Kabupaten Merauke dan berjarak kurang lebih 100 KM dari Pegunungan Bintang. Tidak

Karena alasan itu, maka mereka harus mencek situasi itu. Kopassus menawarkan heli puma untuk itu. Usulan ini ditolak oleh para tokoh masyarakat karena seandainya isu itu benar, bagaimana mungkin bisa dijamin keamanan heli dan orang yang dikirim. Masyarakat juga mulai curiga karena bagaimana mungkin mengangkut Daniel Kogoya dari Tanah Merah ke Marantikin dengan truk padahal hanya ada jalan setapak yang harus dilalui dengan jalan kaki dua minggu lamanya. Gagasan itu akhirnya batal dan disepakati untuk mengirimkan utusan ke Marantikin. Rapat disepakati untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

### **5 Agustus 1998**

Albert Kalakmabin datang kepada Kapolsek dengan membawa surat yang disebutnya dari Karel Uropkulin (OPM) di Marantikin. Surat itu berisikan permintaan Bama. Dalam surat dikatakan juga bahwa Karel Uropkulin tidak berani datang sendiri karena menganggap Kepala Desa Dabolding sering melaporkan kehadiran orang yang datang dari Marantikin. Setelah menerima surat itu, maka Uspika mengadakan rapat di Polsek hari itu juga. Toni Oktemka, guru SD YPPK Mabilabol, diundang dan dimintai pendapat. Ia menyatakan bahwa surat itu salah alamat karena permintaan Bama seharusnya ditujukan kepada Satgas Bencana Alam bukan kepada aparat keamanan. Karena alasan ini, ia tidak bersedia mengomentari lebih lanjut.

### **6 Agustus 1998, pk. 08.00-13.00 WIT**

Berdasarkan radiogram Camat, maka diadakan rapat lanjutan di Balai Desa Kabiding. Rapat itu membahas surat Karel Uropkulin yang diterima oleh Kopassus dan mempersiapkan utusan yang hendak pergi ke Marantikin. Kali ini Danpos Kopassus dan Danpos Yonif Yonif 726 tidak hadir sehingga diwakili oleh Wadanpos 726 dan Wadanpos Tribuana; sementara Danramil dan Kapolsek hadir. Tokoh masyarakat yang hadir adalah Ignas Tapyor, Toni Oktemka, John Sasaka, Yosep Sasaka, Hiron Bamulki, dan Esau Uropmabin. Hasil rapat:

- surat balasan akan dibuat oleh Kapolsek dan Danramil
- utusan yang akan pergi ke Marantikin: Thomas Kalakmabin (Kepala Suku Dabolding), Charles Wayam (pewarta), Bernard Kakyarmabin (petani asal Kabiding), Yosep Wayam (petani asal Dabolding), Levinus Uropmabin (petani asal Okpol), dan Kelly Kasipmabin (petani dari Kabiding)
- segala keperluan perjalanan akan ditanggung penuh oleh Kopassus seperti rokok, makanan, senter, baterai, dan obat-obatan
- utusan akan berangkat tgl 7 Agustus 1998

Rencana ini akhirnya batal karena surat balasan yang kemudian disusun ternyata tidak ditandatangani oleh Danpos Yonif 726. Danpos menolak karena curiga bahwa Surat Karel palsu. Tanda-tandanya: surat itu diketik rapi, dengan bahasa Indonesia yang bagus, amplop rapi, huruf mesin ketik sama dengan mesin ketik Polsek. Akhirnya utusan juga tidak jadi pergi

---

ada hubungan jalan darat dari Tanah Merah ke Kecamatan Oksibil.

dan menyerahkan kembali bekal perjalanan mereka kepada Kopassus.

### **7 Agustus 1998**

Saat tiba di lapangan terbang Oksibil, Pastor Paroki menjumpai Albert Kalakmabin yang sudah lebam mukanya. Ketika ditanya alasannya, ia menjelaskan bahwa hari itu, ia dipanggil oleh tentara di Pos Yonif 726. Dia diinterogasi dan dipukuli agar mengaku bahwa surat yang dibawanya bukan dibuat oleh Karel Uropkulin melainkan dari Kopassus Tribuana di Oksibil. Karena tidak mengaku, Albert mendapat pukulan di wajahnya tetapi kemudian dilepaskan.

Siang harinya, 6 orang utusan tsb. datang ke Pastoran dan menceritakan isi pertemuan di Balai Desa Kabiding dan menceritakan bahwa sesudah rapat di Balai Desa, mereka masih diminta datang ke pos Kopassus untuk diberi instruksi 'melihat kekuatan musuh di Marantikin' dan untuk membeli senjata<sup>3</sup>.

Sementara itu, Toni Oktemka menemui Danramil untuk menjamin keselamatan Anton Uropdana yang saat itu tengah berada di Marantikin. Danramil lalu mengundang Danpos Yonif 726 Tamalatea Oksibil datang ke rumah Danramil untuk membicarakan Anton Uropdana. Kades Okpol itu berada di Marantikin sebenarnya untuk kunjungan keluarga belaka namun karena ia pernah pergi untuk membeli sepucuk senjata atas perintah Kopassus Tribuana di Oksibil, maka sekarang Danpos Yonif 726 tidak mau lagi melihat kejadian serupa. Guru Toni berusaha menjelaskan duduk perkaranya dan Danpos Yonif 726 tersebut bersedia menerima penjelasannya dengan syarat Anton Uropdana pulang tanpa senjata. Hal ini dituntut oleh Toni untuk mencegah jangan sampai kades itu dicurigai sebagai kaki tangan Kopassus yang membeli senjata di PNG untuk dibawa kembali ke Oksibil dan dilaporkan bahwa senjata tersebut berasal dari kelompok OPM. Rupanya Anton Uropdana kembali dan memang tanpa membawa senjata sehingga tidak diapa-apakan. Setelah melaporkan diri kepada Camat, Danramil, dan Danpos Yonif 726, ia kembali ke Desa Okpol.

### **8 Agustus 1998**

Danpos Yonif 726, Lettu Supardi SH, dan Kapolsek Oksibil, Serka Petrus Amir, datang ke pastoran. Mereka membicarakan isu yang berkembang sehubungan dengan surat Karel. Pastor menanggapi bahwa soal menjawab itu terserah pada pihak keamanan. Akan tetapi, Pastor menegaskan bahwa situasi sebenarnya aman, tidak ada tanda-tanda apapun ke arah demo. Tempat-tempat yang disebutkan akan terjadi demo dan pengibaran bendera ternyata setelah dicek, aman saja. Dengan demikian sulit dihindari kesimpulan bahwa semuanya ini adalah rekayasa.

---

<sup>3</sup> 'Membeli senjata' adalah salah satu istilah yang dipakai oleh masyarakat Pegunungan Bintang yang merupakan salah satu mekanisme kerja aparat keamanan. Intinya: secara tersembunyi, sejumlah warga desa diperintahkan untuk membeli senjata di PNG dengan berbekal uang dari pihak aparat keamanan. Senjata yang dibeli itu kemudian dilaporkan sebagai senjata yang dirampas dari kelompok OPM.

## **2. 5 Oktober 1998 : tembak menembak antara pihak Kopassus Tribuana di Oksibil dengan Satgas Yonif 726 Tamalatea.**

Terjadi pertandingan volley di lapangan Oksibil. Rupanya terjadi adu mulut antara regu pasukan 726 dengan regu lawan yang beranggotakan salah satu Kopassus. Regu yang beranggotakan Kopassus kalah dalam bermain. Suryansyah, salah seorang anggota Kopassus yang menjadi penonton, mencabut pistol dan menembakkannya ke udara. Segera regu pasukan bubar dan mengambil senjata mereka di pos dan mengamburkan peluru ke udara dan ke tanah. Tidak ada korban dalam insiden itu tetapi membuat warga desa ketakutan.

Malam harinya, Pastor Willem Sinawil pr, Camat Oksibil, dan Danramil Oksibil, mendatangi Pos Kopassus Oksibil dan dengan tegas menegur mereka atas tindakan yang mendatangkan ketakutan kepada masyarakat itu. Danpos Kopassus menyatakan penyesalan dan pengakuan bersalah.

### **7 Oktober 1998**

Suryansah, anggota Kopassus, datang menemui guru Toni Oktemka di SD YPPK Mabilabol saat jam sekolah. Ia mengatakan kepada guru Toni agar meneruskan pesannya kepada masyarakat, yakni supaya masyarakat jangan takut dengan kejadian tgl 5 Oktober itu karena sebenarnya hanya terjadi salah paham antara Kopassus dengan Pasukan 726. Selain itu, tembakan dibunyikan karena bertepatan dengan hari ABRI.

## ***B. KECAMATAN KIWIROK***

### **Juli 1998: Pemaksaan Pembuatan Surat Pernyataan**

Kepala Desa Oklip, Timotius Taplo, dan Kepala Desa Okhim, Paulus Bawi, didesak oleh Danpos Yonif 726 Tamalatea di Kiwirok untuk membuat surat pernyataan yang intinya: tidak ikut-ikutan menaikkan bendera OPM di wilayah Pegunungan Bintang. Danpos Yonif 726 menyatakan bahwa surat yang sama telah dibuat di Oksibil dan ditandatangani oleh ketua Dewan Adat. Kedua kepala desa menolak untuk segera membuat surat. Setelah mengecek kebenaran berita itu, ternyata di Oksibil tidak pernah ditandatangani surat pernyataan tersebut oleh Ketua Lembaga Adat Ngalum. Yang ada adalah kepala-kepala desa Oksibil dipaksa untuk tanda tangan surat tanpa persetujuan dengan Lembaga Adat. Akhirnya, surat tidak pernah dibuat oleh kedua kepala desa.

## **C. KECAMATAN OKBIBAB**

### **1. Oktober 1998—Januari 1999: ketakutan masyarakat akibat tindak intimidasi dan perbuatan asusila yang dilakukan oleh sejumlah oknum Pasukan Yonif**

#### **Sabtu, 24 Oktober 1998**

Dua anggota pos Yonif 726, yaitu Serda Rusdin dan Nasrullah mengganggu siswa SMUN yang sedang bekerja di sebuah rumah missi yang direncanakan untuk menjadi asrama mereka. Akibatnya anak-anak marah dan menyuruh kedua oknum tentara itu untuk pergi dan tidak mengganggu anak-anak yang masih bekerja. Ternyata mereka pergi ambil senjata dan menembakkan senjatanya di depan sekolah sebanyak tiga kali.

#### **November 1998**

Pada saat pertandingan bola kaki bersama dengan sejumlah masyarakat, kebetulan salah seorang pemain salah menendang bola dan mengenai kaki Serda Rusdin. Pada saat itu juga Serda Rusdin memukul orang tersebut.

#### **31 Desember 1998 s.d 5 Januari 1999**

Pos Yonif 726 Okbibab mengeluarkan undangan untuk pesta dansa Tahun Baru 1999 yang akan berlangsung hingga tgl 5 Januari 1999. Undangan ini dikeluarkan tanpa sepengetahuan masyarakat atau pihak kecamatan dan diberikan secara terbatas. Pada saat itu yang diundang untuk mengikuti dansa adalah siswi-siswi SMUN dan sejumlah gadis desa serta ibu-ibu. Keadaan ini membuat masyarakat resah karena setiap orangtua yang melarang anaknya untuk ikut dansa diancam akan ditembak. Maka dengan demikian masyarakat amat takut. Karena banyak juga siswi SMU yang terlibat, maka kegiatan sekolah tidak berjalan semestinya.

#### **21—25 Januari 1999**

Kembali diadakan pesta dansa. Kegiatan ini berlanjut dengan mengencani beberapa gadis dan juga sejumlah perempuan yang sudah bersuami. Keadaan seperti ini sungguh-sungguh membuat masyarakat resah. Sudah menjadi rahasia umum masyarakat Abmisibil bahwasanya sejumlah anak perempuan berusia sekolah dengan mudah berhubungan seks bebas dengan sejumlah oknum aparat keamanan; juga terdapat kecurigaan luas bahwa anak-anak perempuan<sup>4</sup> yang dipelihara oleh oknum guru<sup>5</sup>, dikondisikan untuk menjalankan hubungan asusila itu. Masyarakat kembali tidak bisa bertindak karena telah diancam tembak di tempat.

---

<sup>4</sup> Nama-nama anak perempuan yang dimaksudkan tersimpan dalam arsip kami.

<sup>5</sup> Nama-nama guru yang dimaksudkan tersimpan dalam arsip kami.

**2. 30 Januari 1999—7 Februari 1999: Perbuatan asusila oleh sejumlah oknum aparat keamanan di Polsek Okbibab dengan Ibu Johana Siktaop dan Ibu Paskalina Uropmabin.**

Malam hari, kira-kira pk. 23.00 WIT, atas permintaan Pradimus Uropmabin, Herman Bamulki, guru SD Inpres Manunggal, pergi ke Polsek Okibab untuk mencari Johana Siktaop, istri dari Pradimus Uropmabin, karena ada yang mengenali sandal milik Johana ada di belakang Polsek. Guru Herman mengetuk pintu Polsek dan Komaruddin, salah seorang anggota Polsek, keluar dengan membawa sebilah parang terhunus. Herman menyatakan maksud kedatangannya untuk mencari Johana; tetapi Komaruddin berkeras bahwa perempuan itu tidak ada di situ. Setelah bersitegang lama, akhirnya Herman pergi ke koramil untuk mencari dukungan. Ia datang kembali ke situ bersama dengan Babinsa Ohee dan Atatu. Kembali terjadi adu mulut sebelum akhirnya Herman memaksa diri masuk bersama kedua orang anggota Koramil. Satu per satu kamar dibuka dan ketika sampai di kamar paling belakang, mereka mendapati Serda Rusdin, anggota Pos Pasukan Yonif 726, berada di kamar itu. Salah satu kamar masih terkunci dan Komarudin mengatakan bahwa kunci kamar hilang. Kembali terjadi ketegangan tetapi akhirnya kunci diberikan setelah Herman mengancam akan membongkar paksa. Setelah dibuka ternyata Johana Siktaop berada di situ. Herman langsung menamparnya dan Ibu itu segera melarikan diri karena suaminya sudah siap dengan anak panah.

Kejadian itu didengar oleh salah seorang anggota Pos Yonif 726 yang segera melaporkannya kepada Danki Yonif 726. Danki segera bertindak dengan memanggil Basilius Siktaop, orang tua dari Johana, Mikael Uropmabin, kepala suku, dan Tinus Uropmabin, Calon Kades Manunggal, untuk menyelesaikan masalah malam itu juga karena keesokan harinya akan terjadi pergantian pasukan. Permintaan ini ditolak oleh orang-orang yang bersangkutan dan bersedia menyelesaikannya pagi hari berikutnya pada jam kerja. Guru Herman diajak oleh salah seorang anggota pasukan untuk datang ke Polsek guna menyelesaikan kasus itu. Ia masuk ke Polsek dan menyatakan kepada Danki, anggota Polsek dan Danramil yang sudah ada di situ bahwa dengan tegas ia menolak menyelesaikan masalah itu malam itu dan bersedia untuk hari berikutnya saat jam kerja sesuai dengan tata cara hukum dan kewajaran.

**31 Januari 1999**

Diadakan pertemuan antara keluarga Johana, Herman Bamulki, Koramil, Polsek, dan pihak pasukan di kantor Polsek Okbibab. Terjadi ketegangan cukup lama karena Herman berkeras bahwa soal ini tidak bisa diselesaikan dengan cara 'membayar denda'. Setelah pihak orang tua Johana menerima cara pembayaran denda, akhirnya terjadi kesepakatan untuk bayar denda sebesar Rp. 350.000,- kepada orang tua Johana dengan perincian : Rp. 250.000,- dari pihak Serda Rusdin dan Rp. 100.000,- dari pihak Komarudin. Persoalan dianggap selesai tetapi Herman meminta waktu untuk bertemu dengan aparat keamanan di Koramil karena dia sendiri punya masalah yang hendak dibicarakan. Hal ini disetujui.

Pertemuan diadakan di Koramil dihadiri oleh Danki Yonif 726, anggota Polsek, Danramil Okbibab. Sebelum masuk ruangan busur dan anak panah milik Herman dilucuti. Herman menceritakan bahwa pagi itu ia telah melukai isterinya dengan parang karena isterinya telah berhubungan seks dengan laki-laki lain yang adalah anggota pasukan dan Polsek. Mendengar hal ini, Danki menanyakan siapakah pelaku itu. Herman lalu menyebutkan nama: Rusdin, Nasrullah, dan Arsyad, ditambah Komarudin, anggota Polsek. Kebetulan Nasrullah ada di ruangan sebelah dan keluar lalu menyatakan bahwa ia memang berhubungan seks dengan Paskalina Uropmabin, istri Herman, tetapi tidak tahu kalau perempuan itu sudah bersuami. Katanya, " O, saya kira masih nona, ternyata sudah lobang besar". Mendengar nada menghina ini, spontan Herman lompat ke meja dan menghunus parang siap memotong Nasrullah. Untunglah Nasrullah cepat lari masuk ke ruang lain dan Danki loncat salto ke belakang menangkap kaki Herman. Kedua orang anggota Koramil merebut parang yang masih terhunus. Setelah bisa diredakan, Herman minta pulang dan meminta kembali busur beserta anak panahnya dengan dalih untuk melindungi diri. Permintaan ini dikabulkan oleh Danramil.

Dalam perjalanan pulang Nasrullah menemui Herman Bamulki dan menyatakan rasa bersalahnya serta mengatakan bahwa tindakan itu tidak dilakukan sendiri. Tiga orang lain terlibat dalam permainan seks asusila itu dan masih ditambah orang yang menjadi perantara. Nasrullah menyebut nama : Rudi Uropmabin, siswa SMPN Okbibab, sebagai orang yang menawarkan Paskalina kepada Nasrullah dan Johana Siktaop kepada orang lain yang tidak diketahuinya; Servina Setamanki, staf Puskesmas Okbibab, yang menawarkan Paskalina kepada Komarudin. Semua peristiwa asusila itu terjadi selama ada Yossim di halaman Koramil Okbibab 11-14 November 1998 lalu. Karena pengakuan ini, kemarahan Herman terhadap Nasrullah luntur. Ia lalu bergegas mencari orang yang disebut sebagai penghubung.

Herman segera melihat Rudi Uropmabin di kompleks SMPN Okbibab. Begitu berhadapan muka dengan Herman dan ditanya apakah betul ia menjadi 'perantara', Rudi langsung lari. Melihat hal ini, Herman segera melemparkan parangnya dan melukai bahu kanan Rudi. Ia juga memanah Rudi meski meleset. Rudi tetap lari dan terus dikejar oleh Herman. Rudi berhasil lolos tetapi kemudian mendapat 21 jahitan di Puskesmas. Tiga hari berikutnya Herman dicari oleh anggota Koramil dan orang tua Rudi. Karena itu ia bersembunyi di hutan. Suasana Abmisibil tegang karena peristiwa ini.

#### **4 Februari 1999**

Andy Urpon, petugas Gereja di Abmisibil, dan Melly Uropmabin, ketua dewan Paroki Abmisibil, menemui Herman dan menyadarkannya. Keduanya berhasil membujuk Herman dan mengajaknya untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Akhirnya disepakati untuk menyelesaikan masalah di hadapan masyarakat Abmisibil tgl. 7 Februari 1999.

### **Minggu, 7 Februari 1999**

Setelah selesai kebaktian di Gereja Katolik Abmisibil, diadakan pertemuan di Kantor Camat Okbibab. Hadir: Camat Okbibab, Sekwilcam, Danramil dan anak buahnya, tokoh-tokoh adat, serta masyarakat. Dalam pertemuan itu dirundingkan uang darah untuk Rudi Uropmabin. Keluarga Rudi mula-mula menuntut uang sejumlah Rp. 2,5 juta. Permintaan ini ditolak oleh Herman dengan tegas. Lalu turun menjadi Rp. 1,5 juta. Hal inipun ditolak oleh Herman dengan alasan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan uang karena menyangkut harga diri dan masa depan orang Ngalum. Jika sekarang, masalah diselesaikan dengan uang, maka masalah-masalah berikutnya pasti mengalami nasib yang sama. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Andy Urpon membujuk Herman dengan mengatakan bahwa menurut adat, kalau ada perdamaian, maka kedua belah pihak yang berseteru harus makan 'matek' (gemuk babi). Selain itu, Andy juga mengatakan bahwa damai terjadi bukan karena ada uang tetapi karena ada pengertian. Karena itu sekarang harus ada denda uang darah. Akhirnya disepakati uang ganti rugi sebesar Rp. 1 juta dengan Rp. 900.000 dibayarkan oleh Herman dan Rp. 100.000 dibayar oleh Sekwilcam. Pelunasan pembayaran disepakati paling lambat akhir bulan Maret 1999 dan ternyata lunas pada waktunya.

Sebagai kelanjutan dari masalah itu, Herman menyadari bahwa ia telah membuat masyarakatnya tegang, cemas, dan takut. Hal ini pasti mempengaruhi kehidupan harian selanjutnya, khususnya tugas sebagai guru. Karena itu ia meminta Camat dan Sekwilcam untuk memberikan dukungan resmi bagi kepindahan tugasnya ke tempat lain. Sejak itu, Herman mulai mencari tempat tugas baru di Oklip.

### **3. 18 Agustus 1998 : pemaksaan penandatanganan surat pernyataan kepada kepala desa Abmisibil, Robert Ningdana**

Surat pernyataan itu dibuat oleh Danpos Yonif 726 Tamalatea Okbibab dan disodorkan kepada Robert Ningdana sebagai kepala desa Abmisibil untuk ditandatangani. Di situ juga tertera dua nama lainnya: Mikael Uromabin (tua Adat) dan Willem Ningdana (Kepala Suku). Oleh Danpos Yonif 726 dikatakan bahwa surat itu dibuat atas perintah Dandim Wamena dan telah disetujui oleh Ketua Lembaga Adat Ngalum di Oksibil. Robert membaca isi surat yang intinya berbunyi:

- mendukung pemerintah RI
- menolak pengibaran bendera bintang kejora
- tidak mendukung GPK
- tidak mendukung kemerdekaan Irian Jaya

Melihat isi surat dan pesan yang diberikan oleh Danpos Yonif, Kades lalu mengatakan bahwa ia akan membicarakannya dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Surat lalu dibawa pulang. Robert berbicara dengan sejumlah tokoh Gereja setempat a.l. Andy Urpon dan Melly Uropmabin. Mereka menasihatkan supaya jangan menandatangani surat semacam itu sebab

“Kita ini berada terjepit di tengah, di antara gerombolan dan ABRI”. Mereka lalu mencek pernyataan Danpos Yonif 726 Okbibab itu kepada Pastor Willem Sinawil pr di Oksibil. Setelah dicek bahwa di Oksibil penandatanganan surat serupa ditolak oleh tokoh adat dan kepala-kepala desa, maka Robert ambil tindakan yang sama. Ia mengembalikan surat asli kepada Danpos Yonif 726 sementara salinnya ia simpan. Selanjutnya ia pergi dari kampung guna menghindarkan penekanan berikutnya.

## **II DAMPAK KEHADIRAN APARAT KEAMANAN**

Dari pemaparan sederetan fakta di atas bisa dianalisis pola terjadinya peristiwa yang berakar pada kehadiran aparat keamanan (militer) di tiga tempat utama di Pegunungan Bintang. Dampak-dampak utama yang berasal dari serangkaian peristiwa tersebut, yakni:

1. aparat keamanan melayani kepentingan siapa?
2. sebuah tindakan sistematis
3. politisasi kehidupan masyarakat desa
4. rusaknya sendi-sendi terdalam kehidupan masyarakat
5. pelestarian rasa takut yang melumpuhkan

### **Ad. 1. Aparat keamanan melayani kepentingan siapa?**

Sejak wilayah Pegunungan Bintang menjadi Daerah Operasi Militer hingga pencabutannya secara resmi tgl. 5 Oktober 1998, kehadiran pasukan militer non-organik di wilayah itu tidak mengalami perubahan berarti. Kehadiran militer (teritorial maupun non-organik) terbukti melahirkan serangkaian fakta negatif seperti dilaporkan di atas. Kehidupan masyarakat desa di Wilayah Pegunungan Bintang tidak berkembang sewajarnya. Mengapa? Karena aparat keamanan senantiasa bertindak seolah-olah sebagai pusat kehidupan masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga pemerintahan.

Seandainya masyarakat didudukkan sebagai pusat kehidupan desa, maka aparat keamanan akan memberikan informasi transparan mengenai apa yang terjadi; mengadakan musyawarah dengan masyarakat pada jam kerja berdasarkan perencanaan yang jelas; mengambil langkah berdasarkan kehendak dan keputusan masyarakat; dan menghormati identitas diri orang Ngalum: adat, kebiasaan, pola pergaulan, keyakinan religius. Fakta yang terjadi sebaliknya: setiap saat masyarakat diwajibkan mengadakan rapat; dengan penuh risiko, masyarakat disuruh mencari senjata ke negara tetangga (PNG); berkali-kali masyarakat dikondisikan untuk mengadakan yosim sepanjang malam; masyarakat dipaksa menandatangani surat pernyataan; masyarakat diperbodoh dengan meniupkan isu-isu politis yang meresahkan.

Di sisi lain, seandainya aparat keamanan berlaku sebagai alat pemerintah, maka ia

tunduk di bawah struktur pemerintah daerah: bertindak atas dasar perintah dari aparat pemda (Camat) atau mengambil inisiatif sejauh telah dibicarakan dengan pihak pemerintah daerah setempat. Senyatanya, pihak aparat keamanan mengambil alih peran pemerintah daerah yang mengatur kehidupan masyarakat; bahkan membawahi aparat pemerintah daerah yang sah tanpa alasan hukum yang memadai.

Dengan demikian fakta-fakta menyatakan bahwa sebenarnya kepentingan masyarakat tidak dihiraukan. Aparat keamanan ternyata melayani kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan masyarakat desa yang seharusnya didahulukan. Malah tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah daerah yang sah, diambil alih begitu rupa. Apakah hal ini bukan merupakan sebuah arogansi kekuasaan?

## **Ad. 2. Sebuah tindakan sistematis**

Wilayah Pegunungan Bintang memiliki relief alam yang sangat terjal. Oksibil, Kiwirok, Abmisibil dan tempat-tempat lain hanya bisa dijangkau secara cepat melalui pesawat terbang. Dalam kondisi geografis sedemikian itu, mobilitas masyarakat cukup rendah. Berdasarkan kenyataan itu, ternyata terdapat unsur-unsur yang mencurigakan dalam rangkaian peristiwa di atas, yakni unsur KESAMAAN. Kesamaan yang mencolok meliputi empat segi:

1. kesamaan waktu: sama-sama terjadi pada bulan Juli-Agustus 1998
2. kesamaan isu: sama-sama ditiupkan masalah politis
3. kesamaan pelaku: sama-sama dilakukan oleh aparat keamanan
4. kesamaan sasaran isu: sama-sama menjadikan masyarakat desa sebagai sasaran

Dengan empat unsur yang menunjukkan kesamaan itu, apakah mungkin bahwa deretan peristiwa itu adalah sebuah kebetulan belaka mengingat tiga tempat tersebut (Oksibil, Kiwirok, Abmisibil) terpisah oleh relief alam yang berat? Pertanyaan selanjutnya apakah rangkaian fakta di atas dengan 4 kesamaan mencolok merupakan tindakan satu dua oknum yang melakukan kesalahan prosedur?

Pertanyaan 'apakah sebuah kebetulan belaka' itu bisa dibandingkan dengan serangkaian peristiwa di Arso tgl. 6-13 Juli 1998<sup>6</sup>. Dalam peristiwa Pemaksaan Tanda tangan oleh Tentara Yonif 411 Kostrad juga terdapat unsur-unsur kesamaan: waktu, isu, pelaku, dan sasaran isu. Bahkan, jika diperbandingkan dengan salah satu peristiwa di Pegunungan Bintang (pemaksaan tanda tangan surat pernyataan), kasus Arso itu persis sama. Mungkinkah kesamaan peristiwa yang berjarak ratusan kilometer dengan halangan alam yang amat berat merupakan sebuah kebetulan?

---

<sup>6</sup> Lihat Surat Pengaduan Masyarakat Arso-Kerom kepada KOMNAS HAM tgl. 14 Juli 1998. Pengaduan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antara masyarakat Arso Kota yang didampingi oleh Pastor Jack Mote pr dengan Pangdam VIII/ Trikora Mayjend TNI Amir Sembiring tgl. 27 Juli 1998 di Aula Makodam.

Apakah unsur-unsur kesamaan dalam peristiwa itu juga merupakan tindakan oknum-oknum belaka? Jawaban atas pertanyaan itu bisa diperbandingkan, misalnya dengan rangkaian fakta lain di Paniai yang dilaporkan oleh Uskup Leo Laba Ladjar OFM<sup>7</sup>. Dalam laporan tersebut, disimpulkan a.l. adanya usaha untuk melestarikan perkara yang kabur dan kelompok Yogi dipakai sebagai legitimasi semata-mata bagi segala macam tindak kekerasan tentara Yonif 712 Rajawali terhadap masyarakat. Apakah fakta-fakta yang sedemikian terang benderang akan ditutup dengan pernyataan “akibat tindakan satu dua oknum” atau lebih tepat perlu dikatakan “kita berhadapan dengan suatu strategi sistematis dan terorganisir”?

### **Ad. 3. Politisasi kehidupan masyarakat desa**

Politisasi kehidupan masyarakat desa terjadi saat isu-isu bermuatan politis secara tiba-tiba muncul di tiga tempat berbeda di wilayah Pegunungan Bintang tetapi dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam bulan Juli-Agustus 1998 warga masyarakat tiba-tiba menjadi aktif bergerak dalam rapat-rapat untuk membicarakan masalah ancaman OPM, kemerdekaan Irija, pernyataan mendukung pemerintah. Konsentrasi masyarakat yang biasanya tercurah pada pekerjaan di kebun tiba-tiba dialihkan ke masalah-masalah yang bermuatan politis yang dilontarkan oleh pihak aparat keamanan. Dengan perpindahan konsentrasi perhatian masyarakat ini, situasi normal kehidupan masyarakat desa cukup terganggu. Situasi ini cukup meresahkan kehidupan masyarakat desa seluruhnya karena muncul kembali kecurigaan satu sama lain; masyarakat desa dikondisikan untuk masuk dalam situasi genting dan terancam; masyarakat desa digerakkan sedemikian rupa sehingga konsentrasi pada kehidupan harian hilang. Ironisnya, keresahan ini justru datang dari aparat keamanan yang membawa isu-isu bermuatan politis dan menggerakkan masyarakat desa untuk menanggapi.

### **Ad. 4. Rusaknya sendi-sendi terdalam kehidupan masyarakat**

Dalam proses perkembangan masyarakat, unsur keluarga dan pendidikan ambil peran yang menentukan. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat Ngalum yang tekun membangun hidup dengan meningkatkan bobot hidup berkeluarga serta mempersiapkan masa depan anak-anak dengan pembinaan mental-kerohanian dan pendidikan formal (sekolah) yang memadai. Proses ini pada mulanya cukup berjalan normal dengan segala keterbatasan yang ada. Akan tetapi, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam tahun 1998 s.d awal 1999, proses ini mengalami gangguan yang cukup hebat, khususnya di lingkungan Abmisibil.

Sebagai konsekuensi logis dari dampak pertama di atas, maka keluarga-keluarga Ngalum telah terkondisi untuk hidup di bawah tekanan kekuasaan. Keluarga-keluarga itu tidak bisa menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana layaknya sebuah keluarga. Empat

---

<sup>7</sup> Lihat Laporan Uskup Leo Laba Ladjar OFM kepada Panglima VIII Trikora tgl. 21 Oktober 1998: “Laporan Situasi Hak-hak Azasi Manusia di Wilayah Paniai dan Tigi, Irian Jaya”.

unsur utama dalam keluarga diganggu dan bahkan dalam taraf tertentu dirusak: [1] ritme kehidupan keluarga, [2] tata pergaulan pria-wanita, [3] hubungan antar anggota keluarga, dan [4] pembinaan anak di rumah, [5] sistem pendidikan sekolah.

**Pertama**, ritme kehidupan keluarga diganggu karena keluarga-keluarga dipaksa untuk hidup menurut agenda politis. Masalah-masalah politis yang sebenarnya diluar jangkauan keluarga dipaksa masuk dan menentukan jalannya hidup keluarga-keluarga di tiga tempat di wilayah Pegunungan Bintang. Kaum laki-laki yang sehari-hari bisa bekerja di kebun untuk mencukupi kebutuhan keluarga dipaksa beralih ke isu-isu politis yang melelahkan dan menyita perhatian.

**Kedua**, rusaknya tata pergaulan pria-wanita akibat praktik hubungan seks bebas. Dalam tata budaya Ngalum, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diatur dengan cermat sehingga hubungan-hubungan yang mengarah pada tindakan seksual hanya diperkenankan dalam rangka perkawinan. Dalam tahun 1998-awal 1999 pola ini dirusakkan akibat berbagai acara dansa dan *yossim* yang sudah dilarang baik oleh Gereja maupun adat karena mengarahkan orang pada tindakan seks asusila. Ironisnya, aparat keamananlah yang mengadakan acara-acara dansa dan *yossim*. Jika diteliti lebih lanjut, terdapat unsur-unsur yang mencolok dalam persoalan ini: pihak pengundang adalah aparat keamanan; tamu undangan terbatas pada kelompok perempuan dan sejumlah pegawai; tidak ada perundingan lebih dulu dengan pihak pemerintah setempat, petugas Gereja, ataupun tokoh-tokoh adat; acara ini berlangsung berulang-ulang; adanya ancaman terhadap para orang tua yang melarang anak perempuannya mengikuti pesta-pesta dansa; termasuk juga intimidasi terhadap Kepala Sekolah SMU yang mencoba untuk menempatkan acara pesta dansa dalam proporsinya yang tepat.

**Ketiga**, hubungan antar anggota keluarga menjadi kacau karena anak tidak lagi ikut pendidikan orang tua dan malah orang tua terancam oleh kekerasan aparat keamanan jika melarang anak-anak perempuannya ikut acara pesta dansa. Ikatan suami--istri yang dijaga dan dijunjung tinggi oleh budaya Ngalum dan agama manapun, rusak karena sejumlah istri terlibat dalam hubungan seks asusila dengan oknum-oknum aparat keamanan. Ikatan yang juga dinilai luhur oleh semua agama resmi diabaikan begitu saja. Hubungan antara fam suami dengan fam istri juga mengalami gangguan serius akibat konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga inti meluas ke fam-fam yang bersangkutan. Persoalan yang sebenarnya terjadi antara aparat keamanan dengan masyarakat berubah menjadi persoalan intern masyarakat.

**Keempat**, pembinaan moral anak-anak, khususnya anak-anak perempuan yang berangkat dewasa mengalami sejumlah kesulitan serius. Anak-anak perempuan itu begitu tersedot perhatiannya pada keramaian pesta-pesta dansa. Acara dansa yang dalam adat dimengerti sebagai tahap menuju perkawinan diperkurus maknanya hingga menjadi acara hiburan semata-mata. Tarikan perhatian ini menjadi lebih kuat karena pihak yang mengadakan acara dansa adalah aparat keamanan yang memiliki kekuatan memaksa. Karena itulah para orangtua,

khususnya di Abmisibil, tidak berdaya lagi mengarahkan perilaku moral anak-anaknya sendiri. Orangtua juga sulit memberikan teladan yang baik karena hidup mereka sendiri telah dirusakkan oleh perilaku asusila dari sejumlah oknum aparat keamanan. Campur tangan aparat keamanan--meski tidak selalu dilakukan secara langsung--begitu menekan praktik kehidupan keluarga.

**Kelima**, selain terhadap pendidikan di rumah, aparat keamanan mengambil peran yang begitu besar dalam hambatan bahkan kerusakan sistem pendidikan sekolah yang ada di Abmisibil. Gangguan, ancaman, dan intimidasi datang dari aparat keamanan tidak hanya kepada para siswa, guru (kepala sekolah), dan orangtua murid tetapi bahkan langsung kepada sistem pendidikan sekolah. Berulang kali sistem belajar-mengajar di SMU dikacaukan dengan kegiatan yossim dan dansa yang diatur oleh oknum-oknum aparat keamanan demi kepentingan oknum-oknum tersebut.

Karena akibat yang ditimbulkan sungguh serius, pantas dipertanyakan mengapa aparat keamanan meniupkan isu-isu politis ke dalam ritme hidup keluarga? Mengapa aparat keamanan tetap melakukan pesta-pesta dansa berulang kali meski adat dan Gereja melarangnya demi pertimbangan moral? Mengapa dipakai cara-cara paksaan dan intimidasi bagi mereka yang mencoba menyuarakan kebenaran? Apakah mungkin semuanya ini hanyalah tindakan spontan dari sejumlah oknum?

#### **Ad. 5. Pelestarian rasa takut yang melumpuhkan**

Dampak yang paling fundamental: dengan sederetan peristiwa itu semakin dilestarikanlah rasa takut yang sudah tertanam sejak daerah Pegunungan Bintang menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Peristiwa yang meresahkan, mencengkam, bahkan menakutkan masyarakat kembali dialami. Rasa takut itu disebut 'melumpuhkan' karena individu, keluarga, dan sistem-sistem pengatur kehidupan masyarakat menjadi tidak berdaya. Individu dibuat tidak berdaya karena setiap tindakannya begitu diintervensi oleh kemauan aparat keamanan. Keluarga dibuat tidak berdaya karena hubungan antar anggota keluarga, ikatan suami-istri, pola pendidikan di dalamnya dirusak hingga tidak bisa berkembang wajar. Sistem-sistem yang menjalankan kehidupan masyarakat biasa juga tidak berjalan wajar: masyarakat begitu saja diwajibkan untuk mengadakan rapat-rapat; tata pergaulan pria-wanita dirusak; ritme hidup sehari-hari didominasi oleh isu-isu politis yang ditiupkan dari pihak luar. Dengan luas dan dalamnya jangkauan rasa takut ini, maka masyarakat sungguh tidak mampu mengembangkan dirinya dan merencanakan hari depannya yang lebih sejahtera. Mengapa justru aparat keamananlah yang mendatangkan kelumpuhan ini?

### **III REKOMENDASI**

Setelah mencermati uraian fakta dan menganalisis dampak-dampaknya, sepantasnyalah dikemukakan sejumlah rekomendasi berdasarkan keprihatinan masyarakat sendiri yang coba disuarakan. Rekomendasi itu adalah sbb.:

1. menyerukan kepada pihak Tentara Nasional Indonesia untuk segera mencabut kehadiran pasukan-pasukan non-organik di wilayah Pegunungan Bintang karena de facto mendatangkan dampak-dampak negatif yang serius dan mendasar;
2. menyerukan kepada pihak Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian RI untuk menempatkan polisi yang sungguh-sungguh melayani kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan rasa aman dan terlindung kepada masyarakat;
3. menyerukan kepada pihak pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian RI untuk mengambil tindakan hukum bagi para oknum aparat keamanan dan guru yang terlibat dalam kasus-kasus di atas;
4. menyerukan kepada pihak Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI untuk mengadakan usaha pemulihan yang wajar dan menyeluruh atas segala luka-luka sosial yang ditimbulkan akibat kehadiran aparat keamanan di wilayah Pegunungan Bintang.